



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN

I N S P E K T O R A T

Jl. Affan Bachsin No. 101 Pasar Baru Manna Bengkulu Selatan

Nomor : 700/ 110 /LHE/IK/2023

Manna, 31 Juli 2023

Lampiran : 1(satu) exemplar

Hal : Laporan Kompilasi Hasil Evaluasi
atas Implementasi Sistem AKIP
pada Organisasi Perangkat Daerah
se Kabupaten Bengkulu Selatan

Kepada,

Yth. Bupati Bengkulu Selatan

di –

Manna

Berdasarkan surat perintah tugas Sekretaris Daerah Nomor : 700/130/SPT/IK/2023 tanggal 02 Mei 2023, kami tim evaluator telah melakukan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja pada Organisasi Perangkat Daerah se Kabupaten Bengkulu Selatan, Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 88 Tahun 2021, setiap pimpinan Instansi/Kepala Daerah untuk melakukan evaluasi AKIP di lingkungannya masing-masing setiap tahun. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi terhadap Organisasi Perangkat Daerah se Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai berikut:

A. Dasar Hukum Evaluasi

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 2) Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3) Peraturan PAN-RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- 4) Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 51 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas pada Perangkat Daerah

B. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.

Untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah, maka perlu dilakukan suatu evaluasi implementasi SAKIP. Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong instansi pemerintah di pusat dan daerah untuk secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

C. Tujuan Evaluasi

- a. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
- c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
- e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

D. Ruang Lingkup Evaluasi

- a. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
- b. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
- c. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya

- d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
- e. Penilaian capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya.

E. Metodologi Evaluasi

1. Metodologi yang digunakan pragmatis sesuai tujuan evaluasi yaitu:
 - a) Pengumpulan data dan informasi melalui kuesioner instrument penilaian AKIP
 - b) Penelitian dokumen Perencanaan serta dokumen terkait lainnya dengan menggunakan kertas kerja evaluasi
 - c) Wawancara dengan OPD untuk klarifikasi dan pemenuhan dokumen yang diperlukan
2. Sasaran penilaian evaluasi terdiri atas 4 (empat) komponen meliputi
 - a) Perencanaan Kinerja
 - b) Pengukuran Kinerja
 - c) Pelaporan Kinerja
 - d) Evaluasi Akuntabilitas kinerja Internal
3. Komponen evaluasi dan bobot penilaian

No	Komponen	Bobot	Sub Komponen
1	Perencanaan Kinerja	30	Keberadaan 20% Kualitas 30% Pemanfaatan 50%
2	Pengukuran Kinerja	30	Keberadaan 20% Kualitas 30% Pemanfaatan 50%
3	Pelaporan Kinerja	15	Keberadaan 20% Kualitas 30% Pemanfaatan 50%
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	Keberadaan 20% Kualitas 30% Pemanfaatan 50%

F. Gambaran Umum OPD

Evaluasi SAKIP OPD berdasarkan klaster sebagaimana Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021, Tim evaluator telah melaksanakan evaluasi pada 29 Organisasi Perangkat Daerah se Kabupaten Bengkulu Selatan:

a. Klaster utama

- 1) Bappeda litbang
- 2) Inspektorat
- 3) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- 4) Dinas Kesehatan
- 5) Dinas Pekerjaan Umum
- 6) Dinas Perumahan Permukiman
- 7) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
- 8) Dinas Sosial
- 9) Dinas Pertanian
- 10) Dinas Perikanan
- 11) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
- 12) Dinas Pariwisata
- 13) Badan Penanggulangan Bencana Daerah

b. Klaster Pendukung

- 1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- 2) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- 3) Dinas Ketahanan Pangan
- 4) Dinas Lingkungan Hidup
- 5) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 6) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
- 7) Dinas Perhubungan
- 8) Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 9) Dinas Pemuda dan Olahraga
- 10) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

c. **Klaster Tambahan**

- 1) Dinas Komunikasi dan Informasi
- 2) Sekretariat Daerah
- 3) Sekretariat DPRD
- 4) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- 5) Badan Keuangan Daerah
- 6) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

G. Gambaran Implementasi SAKIP pada OPD

Berdasarkan Hasil Evaluasi terhadap 29 Organisasi Perangkat Daerah, secara umum seluruh Organisasi Perangkat Daerah telah menyusun Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026, Rencana Kerja Tahun 2021, telah terdapat Perjanjian Kinerja eselon 2, 3 dan 4, namun masih terdapat OPD yang belum menyusun pedoman teknis perencanaan dan pengukuran kinerja, Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) belum seluruhnya menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai, secara umum seluruh Organisasi Perangkat Daerah telah menyusun Laporan kinerja, namun kualitas laporan kinerja belum sepenuhnya sesuai standar Permenpan Nomor 53 Tahun 2014.

H. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun sebelumnya

Pada tahun 2021, Tim evaluator APIP telah melakukan Evaluasi SAKIP pada 29 Organisasi Perangkat Daerah, namun Terhadap kekurangan atas Komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum seluruh Organisasi Perangkat Daerah melaksanakan Tindaklanjutan atas rekomendasi dan catatan kelemahan, ini tergambarkan pada evaluasi Tahun 2023 terdapat catatan berulang sehingga ada beberapa Organisasi Perangkat Daerah mendapatkan nilai SAKIP yang turun dibandingkan tahun sebelumnya.

I. Hasil Evaluasi

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Organisasi Perangkat Daerah se Kabupaten Bengkulu Selatan terdiri pada empat komponen dan setiap komponen terbagi pada 3 sub komponen yang

terdiri dari sub komponen Ketersediaan Dokumen, sub komponen Kualitas dokumen, dan sub komponen Pemanfaatan dokumen.

Dari ikhtisar hasil evaluasi pada Organisasi Perangkat Daerah se Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai berikut :

- a) Organisasi Perangkat Daerah dengan nilai (70 – 80) dan predikat BB (sangat baik) kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan nasional.**

No	KOMPONEN PENILAIAN	Bobot	Bappeda Litbang	Kominfo	Satpol-PP	Inspektorat
1.	PERENCANAAN KINERJA (30)	30	22,50	22,50	23,70	24,00
	Ketersedian	6	4,80	4,80	5,40	4,80
	Kualitas	9	7,20	7,20	6,30	7,20
	Pemanfaatan	15	10,50	10,50	12,00	12
2.	PENGUKURAN KINERJA (30)	30	21,00	21,00	22,50	19,50
	Ketersedian	6	4,2	4,20	4,80	3,60
	Kualitas	9	6,30	6,30	7,20	5,4
	Pemanfaatan	15	10,5	10,50	10,50	10,5
3.	PELAPORAN KINERJA (15)	15	12,00	10,50	10,80	11,5
	Ketersedian	3	2,40	2,10	2,40	2,4
	Kualitas	4,5	3,60	3,15	3,15	3,15
	Pemanfaatan	7,5	6,00	5,25	5,25	6,00
4.	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL (25)	25	18,5	19,25	16,25	16,25
	Ketersedian	5	4,50	4,00	3,50	4,00
	Kualitas	7,5	5,25	5,25	5,25	6,00
	Pemanfaatan	12,5	8,75	10,00	7,75	6,25
NILAI EVALUASI			74,01	73,26	73,26	71,31

- b) Organisasi Perangkat Daerah dengan nilai (60 – 70) dan predikat B (Baik) kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75% - 100%).**

NO	NAMA OPD	KOMPONEN PENILAIAN																NILAI EVALU ASI
		PERENCANAAN KINERJA (30)				PENGUKURAN KINERJA (30)				PELAPORAN KINERJA (15)				EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL (25)				
1	Dinas Pertanian	4,2	7,2	12,0	23,40	4,20	6,3	9,00	19,50	1,80	3,15	5,25	10,20	4,00	5,25	7,50	16,75	69,86
2	BKPSDM	4,8	7,2	10,50	22,50	4,20	6,3	10,5	21,00	2,1	3,15	5,25	10,50	3,00	4,50	7,50	15,00	69,01
3	DPPKBP3A	4,8	6,3	9	20,10	4,80	5,4	10,5	20,70	1,8	2,70	5,25	9,75	4,00	3,75	7,5	15,25	65,8 1
4	Dikbud	4,2	6,3	10,50	21,00	4,20	5,4	10,5	20,10	2,10	3,15	5,25	10,50	3	4,5	6,25	13,75	65,36
5	Dispar	4,8	7,2	10,50	22,50	4,20	5,4	9,00	18,60	1,80	3,15	5,25	10,20	3,00	3,75	6,25	13,00	64,31

6	DLHK	4,8	6,3	9,00	20,10	4,80	6,3	7,50	18,60	1,80	2,70	4,50	9,00	3,50	4,50	6,25	14,25	61,96
7	Dinas Sosial	5,4	7,2	9,00	21,60	3,60	4,5	9,0	17,10	2,4	2,25	5,25	9,90	3,50	2,25	3,70	13,25	61,86
8	Dinas Perpus	4,2	6,3	10,50	21,00	3,60	5,4	7,50	16,50	2,1	3,15	5,25	10,50	3,00	4,50	6,25	13,75	61,76
9	Dispora	4,8	5,4	9,00	19,20	3,60	5,4	9,00	18,00	1,80	2,70	4,50	9,00	3,00	4,50	7,50	15,00	61,21
10	Dinas Perindag	4,8	7,2	12,00	24,00	3,00	4,5	9,00	16,50	2,40	3,60	7,50	12,00	2,50	2,25	3,75	8,50	61,01
11	DKP	4,2	6,3	10,5	21,00	4,20	5,4	9,00	18,60	2,1	3,15	5,25	10,50	2,50	3,75	3,75	10,00	60,11

c) Organisasi Perangkat Daerah dengan nilai (50 – 60) dan predikat CC (Cukup)
kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50% - 75%)

NO	NAMA OPD	KOMPONEN PENILAIAN																NILAI EVALUASI ASI
		PERENCANAAN KINERJA (30)				PENGUKURAN KINERJA (30)				PELAPORAN KINERJA (15)				EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL (25)				
1	Dinas Perhubungan	4,2	6,3	9,00	19,00	4,2	5,4	9,0	18,60	1,8	2,25	4,5	8,55	3,00	3,75	6,25	13,00	59,66
2	Sekretariat DPRD	4,2	5,4	9,00	18,60	3,6	4,5	9,0	17,10	2,1	2,70	4,5	9,30	3,00	3,75	7,50	14,25	59,26
3	Dinas PMD	4,2	6,3	9,00	19,50	3,6	5,4	9,0	18,00	1,8	2,25	3,75	7,80	2,50	4,50	6,25	13,25	58,56
4	Badan Keuangan Daerah	5,4	6,3	7,50	19,20	3,6	5,4	9,0	18,00	2,10	2,25	3,75	8,10	3,00	3,75	6,25	13,00	58,31
5	Sekretariat Daerah	3,6	5,4	9,00	18,00	3,0	4,5	7,50	15,90	1,5	2,25	3,75	7,50	3,00	4,50	7,50	15,00	56,41
6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4,2	5,4	7,5	17,10	3,6	4,5	7,50	15,60	1,8	2,25	3,75	7,80	3,00	3,75	6,25	13,00	53,51
7	Dinas DPMPTSP	4,8	4,5	7,5	16,80	3,0	4,5	7,50	15,00	2,1	2,25	3,75	8,10	2,50	3,75	6,25	12,50	52,41
8	Dinas BPBD	4,2	4,5	7,5	16,20	3,0	4,5	9,00	16,50	2,1	1,88	4,50	8,48	2,50	3,75	3,75	10,00	51,26
9	Dinas Kesehatan	4,2	4,5	7,5	16,20	3,0	4,5	7,50	15,00	1,50	2,25	3,75	7,50	2,50	3,75	6,25	12,50	51,21
10	Dinas Perikanan	4,8	6,3	9,0	20,10	1,8	4,50	7,50	13,80	2,10	1,35	3,75	7,20	2,50	3,75	3,75	10,00	51,11

d) Organisasi Perangkat Daerah yang mendapatkan nilai (30 -50) dan predikat C (Kurang) kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25% - 50%).

NO	NAMA OPD	KOMPONEN PENILAIAN																NILAI EVALUASI
		PERENCANAAN KINERJA (30)				PENGUKURAN KINERJA (30)				PELAPORAN KINERJA (15)				EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL (25)				
1	Dinas PU PR	3,6	5,4	7,5	16,50	3,60	4,5	4,5	12,60	1,8	2,25	3,75	7,80	2,5	3,75	6,25	12,50	49,41
2	Dinas Kesbangpol	4,2	5,4	9,0	18,60	4,20	0,0	7,5	11,70	2,1	3,15	5,25	10,5	2,5	3,75	0,0	6,25	47,06
3	Dinas Perkim	3,6	5,4	7,5	15,60	3,60	4,50	4,50	12,60	1,5	1,35	3,75	6,60	2,5	3,75	3,75	10,00	45,71
4	Dinas Transnaker	4,2	5,4	7,5	17,10	1,8	2,7	7,5	12,00	1,5	3,15	2,25	6,90	1,5	2,25	3,75	7,5	43,51

- e) **Organisasi Perangkat Daerah yang hasil evaluasi dengan nilai (30) dan predikat D (sangat kurang) kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>0% - 25%).**

J. Catatan atas Kekurangan Hasil Evaluasi

Berdasarkan hasil evaluasi pada Organisasi Perangkat Daerah se Kabupaten Bengkulu Selatan, secara umum terdapat catatan dan kekurangan sebagai berikut:

- 1) Masih terdapat Organisasi Perangkat Daerah yang belum menyusun peraturan turunan yang disusun dalam bentuk peraturan Kepala Organisasi Perangkat Daerah.
- 2) Belum terdapat SOP/pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja.
- 3) Ada beberapa Organisasi Perangkat Daerah yang Sistematis dan substansi dalam penyusunan LKJ Tahun 2022 secara umum telah berdasarkan lampiran Permenpan RB nomor 53 Tahun 2014, namun belum disusun secara memadai, belum memuat keberhasilan dan kegagalan serta upaya pencapaian target dan hambatan, disebabkan LKj belum disusun berdasarkan laporan kinerja triwulan secara berkala dan berjenjang.
- 4) Sebagaimana rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum ditindaklanjuti.
- 5) Masih terdapat Organisasi Perangkat Daerah yang belum melaksanakan Evaluasi Kinerja Internal secara periodik
- 6) Hasil rekomendasi evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang dilakukan oleh APIP tahun yang lalu belum ditindaklanjuti, serta belum dimanfaatkan untuk mencapai efektifitas dan efisiensi kinerja

K. Rekomendasi atas Catatan Kekurangan untuk Perbaikan

a. Perencanaan Kinerja

1. Agar menyusun SOP terkait Perencanaan Kinerja Internal yang ditetapkan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah.
2. Agar melakukan pengukuran kinerja secara berkala di setiap jenjang

b. Pengukuran Kinerja

1. Agar menyusun Pedoman pengukuran Kinerja dan pengumpulan data kinerja Internal

yang ditetapkan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah.

2. Agar membuat rencana aksi monev pengukuran kinerja internal secara berkala
3. Agar membuat rencana aksi pengukuran data kinerja internal setiap jenjang secara berkala
4. Agar membuat laporan hasil pengukuran data kinerja dan capaiannya secara periodik pada setiap jenjang
5. Agar melakukan monev pengukuran kinerja serta menuangkannya dalam bentuk laporan monev secara berkala pada setiap jenjang beserta rekomendasinya
6. Agar pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja dapat menggunakan teknologi (aplikasi)
7. Agar hasil pengukuran capaian kinerja menjadi acuan dalam pemberian reward dan punishment

c. Pelaporan Kinerja

1. Agar menyusun Laporan Kinerja sesuai dengan standar pada lampiran Permen PAN RB Nomor 53 Tahun 2014
2. Laporan Kinerja di buat secara berkala dan memuat target capaian pada renaksi berikut keberhasilan, kegagalan serta hambatan dan upaya yang dilakukan untuk mencapai target pada setiap jenjang
3. Laporan kinerja setiap jenjang terdapat rekomendasi untuk perbaikan sehingga seluruh ASN memahami peran/tusi/mandat/PK yang sesuai dengan target kinerja periodik

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

1. Agar menyusun SOP/Pedoman Evaluasi akuntabilitas Kinerja Internal yang ditetapkan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah.
2. Agar menyusun laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara berkala pada setiap jenjang
3. Menyusun laporan hasil tindak lanjut atas rekomendasi secara berkala sesuai dengan rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara berjenjang
4. Untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil Evaluasi AKIP yang dilakukan oleh APIP

L. Penutup

Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil evaluasi AKIP Tahun 2022 pada 29 Organisasi Perangkat Daerah se Kabupaten Bengkulu Selatan dapat disimpulkan bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja pada 29 Organisasi Perangkat Daerah di nilai rata-rata dengan nilai dan predikat B sebagai berikut:

NO	NAMA	NILAI	BOBOT
1	Bappeda Litbang	74,01	BB
2	Kominfo	73,26	BB
3	Satpol PP	73,26	BB
4	Inspektorat	71,31	BB
5	Dinas Pertanian	69,86	B
6	BPKSDM	69,01	B
7	DPPKBP3A	65,81	B
8	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	65,36	B
9	Dinas Pariwisata	64,31	B
10	DLHK	61,96	B
11	Dinas Sosial	61,86	B
12	Dinas Perpustakaan Daerah	61,76	B
13	Dinas Pemuda dan Olahraga	61,21	B
14	Dinas Perdagangan	61,01	B
15	Dinas Ketahanan Pangan	60,11	B
16	Dinas Perhubungan	59,66	CC
17	Sekretariat DPRD	59,26	CC
18	Dinas PMD	58,56	CC
19	BKD	58,31	CC
20	Sekretariat Daerah	56,41	CC
21	Dinas Dukcapil	53,51	CC
22	DPMPTSP	52,41	CC
23	BPBD	51,26	CC
24	Dinas Kesehatan	51,21	CC
25	Dinas Perikanan	51,11	CC
26	Dinas PU-PR	49,41	C
27	Badan Kesbangpol	47,06	C
28	Dinas Perkim	45,71	C
29	Dinas Transnaker	43,51	C
Nilai rata-rata			B

Diharapkan setiap Organisasi Perangkat Daerah agar produktif untuk segera menindaklanjuti rekomendasi atas Catatan Hasil Evaluasi, sebagaimana yang telah dituangkan dalam berita acara kesepakatan hasil evaluasi antara evaluator dan evaluatan yang menjadi lampiran dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) pada masing masing perangkat daerah masih melakukan perbaikan di Tahun 2023 sehingga implementasi SAKIP akan lebih baik serta didukung oleh data/bukti dokumen yang handal

Demikian Laporan Kompilasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada Organisasi Perangkat Daerah se Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2023 disampaikan.

INSPEKTOR DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN



HAMDAN S. Sos
NIP.197201011993031007